

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Pariaman

*Dasar
Hukum
Entitas
dan
Rencana
Strategis*

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Pariaman didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan **Undang-undang Nomor 31 tahun 2008** tentang **Perikanan bahwa Pemerintah Menyelenggarakan dan Mengembangkan Sistem Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan** Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan. Entitas berkedudukan di Jalan Simpang Toboh V, Koto Kampung Dalam, Pariaman, Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Pariaman mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Pariaman berkomitmen dengan visi **“Penyelenggara Pendidikan Vokasional Kelautan dan Perikanan yang Unggul, Berkelanjutan dan Bertaraf Internasional.”** Sedangkan Misi yang diemban adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Pendidikan yang Berbasis Kompetensi dan Berbasis Industri.
- Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi.

- Mengembangkan Teaching Factory untuk Meningkatkan Jiwa Wirausaha Peserta Didik.
- Mengembangkan Ekosistem Pendidikan Vokasional yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Pariaman. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPM) Pariaman menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPM) Pariaman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam

laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPM) Pariaman. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPM) Pariaman adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA* **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO* **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1) Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi

sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016;
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016;
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi **(8) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali**

*Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
AkruaI
Pertama Kali*

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam LO dan LPE tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPM) Pariaman* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal hingga revisi POK. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran, pemutakhiran data, pergeseran antar KRO dan antar kegiatan dengan dalam hal pagu anggaran tetap. Perubahan tersebut berdasarkan sumber dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Periode Januari s/d 31 Desember 2025 (dalam Rp.000)							
	Anggaran Awal	Rev. DIPA ke-1	Revisi KPA ke-2	Revisi KPA ke-3	Rev. KPA ke-4	Rev. Kanwil ke-5	Rev. DIPA ke-6	Rev. KPA ke-7
Pendapatan:								
- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (425112)	1.200.050	1.200.050	1.200.050	1.200.050	1.200.050	1.200.050	1.200.050	1.200.050
- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119)	44.539	44.539	44.539	44.539	44.539	44.539	44.539	44.539
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan (425131)	15.640	15.640	15.640	15.640	15.640	15.640	15.640	15.640
- Pendapatan dari penggunaan sarana prasarana sesuai dengan TUSI (425151)	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan (425411)	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pendapatan Biaya Pendidikan (425412)	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan	1.315.229	1.315.229	1.315.229	1.315.229	1.315.229	1.315.229	1.315.229	1.315.229
Belanja:								
- Belanja Pegawai	5.291.371	5.291.371	5.291.371	5.291.371	5.291.371	5.291.371	5.291.371	5.291.371
- Belanja Barang	7.225.867	7.225.867	7.225.867	7.225.867	7.225.867	7.225.867	5.322.717	5.322.717
- Belanja Modal	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	49.997	49.997
Jumlah Belanja	12.767.238	12.767.238	12.767.238	12.767.238	12.767.238	12.767.238	10.664.085	10.664.085

Uraian	Periode Januari s/d 31 Desember 2025 (dalam Rp.000)				
	Rev. KPA ke-8	Rev. DIPA ke-9	Revisi KPA ke-10	Revisi KPA ke-11	Rev. KPA ke-12
Pendapatan:					
- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (425112)	1.200.050	1.200.050	1.200.050	1.200.050	1.200.050
- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119)	44.539	44.539	44.539	44.539	44.539
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan (425131)	15.640	15.640	15.640	15.640	15.640
- Pendapatan dari penggunaan sarana prasarana sesuai dengan TUSI (425151)	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan (425411)	0	0	0	0	0
- Pendapatan Biaya Pendidikan (425412)	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan	1.315.229	1.315.229	1.315.229	1.315.229	1.315.229
Belanja:					
- Belanja Pegawai	5.291.371	5.391.371	5.391.371	5.391.371	5.391.371
- Belanja Barang	5.322.717	5.622.717	5.622.717	5.622.717	5.622.717
- Belanja Modal	49.997	49.997	49.997	49.997	49.997
Jumlah Belanja	10.664.085	11.064.085	11.064.085	11.064.085	11.064.085

*Realisasi
Pendapatan
Rp.523.839.215.*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp523.839.215 atau mencapai 103,82% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar

Rp504.543.000. Pendapatan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Pariaman yang berasal dari Pendapatan penjualan hasil pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (425112), pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya (425119), pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (425131), pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai TUSI (425151), pendapatan biaya pendidikan (425412), penerimaan kembali belanja pegawai TAYL (425911) dan penerimaan kembali belanja barang TAYL (425912). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025			
	Anggaran		Realisasi	% Real. Angg
	Semula	Menjadi		
Pendapatan dari Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (425112)	1.200.050.000	468.765.000	476.765.000	101,71
Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119)	44.539.000	407.000	5.457.000	1340,79
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)	15.640.000	7.889.833	7.889.875	100,00
Pendapatan Penggunaan Sarana & Prasarana Sesuai TUSI (425151)	55.000.000	19.472.000	25.718.173	132,08
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129)	0	7.954.330	7.954.330	100,00
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan (425411)	0		0	0,00
Pendapatan Biaya Pendidikan (425412)	0		0	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911)	0	54.837	54.837	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912)	0		0	0,00
Jumlah	504.543.000	504.543.000	523.839.215	103,82

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2025 mengalami penurunan 20,04% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan pada estimasi pendapatan TA 2025 mengalami penurunan di beberapa realiasi komponen PNBPN.

Dari tabel diatas dapat juga dijelaskan bahwa terjadi perubahan Target PNBPN berdasarkan Nota Dinas dari BPPSDM-KP Nomor 367/BPPSDM.1/KU.340/XI/2025 tanggal 13 November 2025, tentang Perubahan Target PNBPN pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Satuan Kerja Lingkup BPPSDM-KP. Dalam nota dinas tersebut ditetapkan target PNBPN yang semula Rp1.315.229.000,00 menjadi Rp504.543.000,00.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	%NAIK/ TURUN
Pend. dari Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (425112)	476.765.000	515.293.090	7,48
Pend. Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119)	5.457.000	8.763.000	37,73
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129)	7.954.330	0	100,00
Pend. Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)	7.889.875	20.903.777	62,26
Pend. Penggunaan Sarana & Prasarana Sesuai TUSI (425151)	25.718.173	16.076.300	59,98
Pend. Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan (425411)	0	0	0,00
Pend. Biaya Pendidikan (425412)	0	7.800.000	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911)	54.837	2.235.778	97,55
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912)	0	84.061.750	0,00
Jumlah	523.839.215	655.133.695	20,04

Berdasarkan tabel diatas terjadi kenaikan atau penurunan pendapatan bukan pajak lainnya pada periode 31 Desember 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan dari penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya yaitu:pengelolaan tambak udang vanamei dalam hal ini melibatkan peserta didik untuk praktek Prodi Budidaya) terlaksana tidak maksimal. Dimana terjadi penurunan sebesar 7,48% dibandingkan dengan tahun 2024.
2. Pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya terjadi penurunan sebesar 37,73% dibandingkan dengan tahun 2024.
3. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan terjadi penurunan sebesar 62,26% dibandingkan dengan tahun 2024.
4. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai TUSI terjadi kenaikan sebesar 59,98% dibandingkan dengan tahun 2024.
5. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar 100,00% karena terjadi lelang terhadap penghapusan BMN TA 2025.

Realisasi
Belanja
Negara

Rp10.061.657.416

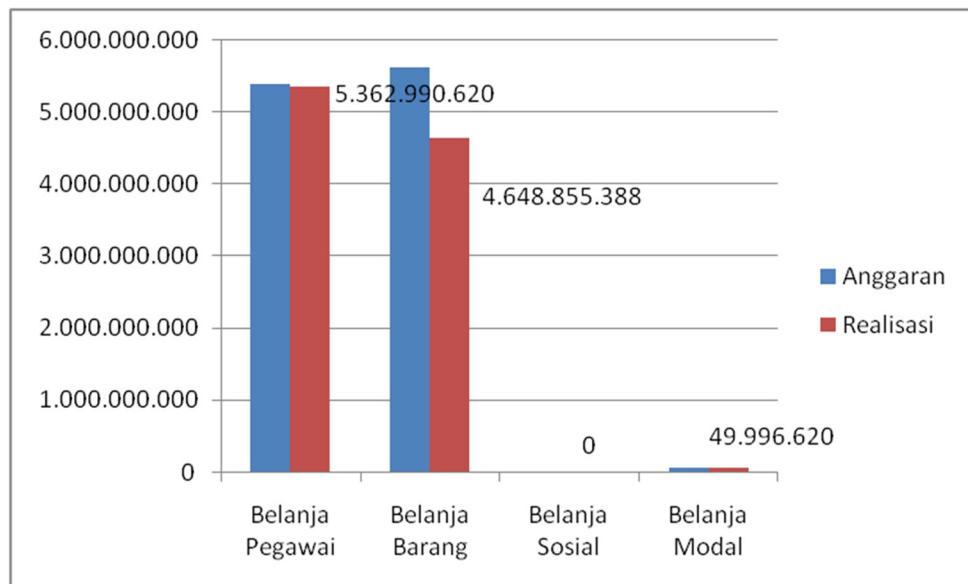
B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp10.061.657.416. atau 90,94% dari anggaran belanja sebesar Rp11.064.085.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian Belanja	2025		
	Anggaran	Realisasi	Naik/ Turun (%)
Belanja Pegawai	5.391.371.000	5.362.990.620	99,47
Belanja Barang	5.622.717.000	4.648.855.388	82,68
Belanja Sosial	0	0	
Belanja Modal	49.997.000	49.996.620	100,00
Total Belanja Kotor	11.064.085.000	10.061.842.628	90,94
Pengembalian		185.212	
Jumlah Netto	11.064.085.000	10.061.657.416	90,94

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	Naik/ Turun (%)
Belanja Pegawai	5.362.990.620	5.109.691.625	4,96
Belanja Barang	4.648.855.388	7.411.157.546	-37,27
Belanja Sosial	0	0	
Belanja Modal	49.996.620	1.134.129.680	-95,59
Total Belanja Kotor	10.061.842.628	13.654.978.851	-26,31
Pengembalian	(185.212)	(1.414.120)	
Jumlah Netto	10.061.657.416	13.653.564.731	-26,31

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan realisasi yang terjadi tahun 2025. Pada belanja pegawai terjadi kenaikan senilai 4,96%, sedangkan pada realisasi belanja barang dan modal terjadi penurunan masing-masing sebesar 37,27% dan 95,59%. Sedangkan pengembalian belanja senilai Rp185.212,00 berasal dari belanja pegawai.

Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 26,31%. Hal ini disebabkan antara lain:

Dengan adanya refocussing anggaran guna mendukung program prioritas lainnya sehingga terjadi efisiensi terhadap belanja lingkup KKP pada umumnya dan lingkup BPPSDM-KP pada khususnya. Dampak penghematan anggaran terhadap terhadap satker Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman adalah terjadi penurunan signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Belanja

B.3 Belanja Pegawai

Pegawai

Rp.5.362.805.408

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.362.805.408 dan Rp5.109.691.625. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,96% dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Secara garis besar karena kenaikan anggaran belanja pegawai yang dianggarkan di tahun 2025 sebesar Rp5.391.371.000, dengan jumlah pegawai yang terdiri dari ASN sebanyak 35 orang dan PPPK sebanyak 22 orang. Dalam pelaksanaan anggaran terealisasi yaitu sebesar Rp5.362.805.408 sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp28.565.592.
2. Monitoring berkala terhadap realisasi belanja pegawai maksimal dilakukan untuk mengantisipasi kelebihan maupun kekurangan sisa pagu diakhir tahun anggaran (perubahan-perubahan status kepegawaian ASN baik itu kenaikan pangkat, berkala maupun perubahan jabatan).

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Satker SUPM Negeri Pariaman pada akhir tahun 2025 adalah 35 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Tenaga Pendidik sebanyak 9 orang sebagai guru, dengan 1 orang pegawai mengikuti tugas belajar.
- Tenaga kependidikan sebanyak 15 orang,
- ASN PPPK sebanyak 22 orang.

Rincian PNS SUPM Pariaman Berdasarkan Jenis Jabatan,

Golongan & Kualifikasi Pendidikan Per 31 Desember 2025

No.	Jenis Jabatan	Golongan				Kualifikasi Pendidikan				
		I	II	III	IV	SLTP	SLTA	D3	S1/D4	S2
I	Struktural									
1	Eselon IV									
	- Kepala Sub.Bag. Umum			1					1	
	Jumlah (I)			1					1	
II	Fungsional Tertentu									
1	Guru									
	- Guru Ahli Madya				1					1
	- Guru Ahli Muda			6					4	2
	- Guru Ahli Pertama									
2	Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)									
	- PLP Penyelia									
3	Instruktur									
	- Instruktur Ahli Muda									
	- Instruktur Ahli Pertama									
4	Fungsional Keterampilan									
	- Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda									
	- Pranata Keuangan APBN Mahir			1				1		
	- Pranata Keuangan APBN Terampil			1			1			
	Jumlah (II)			8	1		1	1	4	3
III	Fungsional Umum									
1	Pelaksana Adm. dan Teknis		6	20	1		13		10	4
	Jumlah (III)									
	Total (I+II+III)		6	29	2		14	1	15	7

Selama tahun 2025, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan SDM maupun pengetahuan formal dan non formal terhadap ASN di lingkup SUPM Negeri Pariaman adalah sebagai berikut :

- Seluruh ASN/pegawai telah mengikuti diklat IHT (in House Training) untuk peningkatan kompetensi masing-masing.

Komposisi Non PNS SUPM Pariaman Sampai dengan Periode 31 Desember TA 2025

No.	Jenis Jabatan	Kualifikasi Pendidikan				
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1/D4
1	Tenaga IT					1
2	QC (Quality Controll)					1
3	Tenaga Administrasi RT					1
4	Pembantu Kepala Instalasi Pengolahan Modern					1
5	Petugas Kesehatan				2	
6	Satpam/Petugas Keamanan			3		
7	Juru Masak	2	2			
8	Petugas Kebersihan Ruangan dan Peralatan Makan Siswa/i	1	1			
9	Pramubakti Kantor		1			
10	ABK			1		
11	Pembantu Pool Kendaraan/Sopir			1		
12	Tenaga Teknis Budidaya					2
13	Tenaga Teknis Pengolahan Tradisional			1		
14	Tenaga Bengkel					1
15	Tenaga Administrasi/E-Layar					1
16	Pembantu Hatchery Ikan Hias					1
17	Pembantu Hatchery Ikan Air Tawar					1
18	Pembantu Mesin Pendingin			1		
	Jumlah	3	4	7	2	10

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA.2025	REALISASI TA.2024	% (NAIK/ TURUN)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.910.775.855	3.066.447.556	5,08
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN PPPK	334.693.279	61.676.344	442,66
Belanja Tunj.Khusus/Kinerja	2.096.218.486	1.942.056.579	7,94
Belanja Lembur	21.303.000	40.254.000	47,08
Belanja Vakasi		0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	5.362.990.620	5.110.434.479	4,94
Pengembalian Belanja Pegawai	185.212	742.854	
Jumlah Belanja	5.362.805.408	5.109.691.625	4,95

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp4.648.855.388

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.648.855.388 dan Rp7.411.157.546. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan 37,27% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh turunnya jumlah pagu belanja barang untuk penunjang kegiatan tahun 2025.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA.2025	REALISASI TA.2024	% (NAIK/ TURUN)
Belanja Barang Operasional	637.614.873	3.214.768.305	80,17
Belanja Barang Non Operasional	1.917.635.876	3.063.234.711	37,40
Belanja Jasa	1.560.184.800	1.135.441.087	37,41
Belanja Pemeliharaan	450.655.465	1.642.656.027	72,57
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	62.770.374	707.003.500	91,12
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	19.994.000	24.545.639	18,54
Jumlah Belanja Kotor	4.648.855.388	9.787.649.269	52,50
Pengembalian Belanja	0		
Jumlah Belanja	4.648.855.388	9.787.649.269	52,50

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a. Realisasi belanja barang operasional pada TA 2025 terjadi penurunan sebesar Rp2.577.153.432,- atau 80,17% dibandingkan tahun 2024 yang diperuntukkan untuk:
 - Belanja keperluan perkantoran sebesar Rp538.824.873, dengan sisa anggaran sebesar Rp93.127,00 dan

- Belanja honor operasional satker sebesar Rp98.790.000, dengan sisa anggaran sebesar Rp0.

Adapun realisasi yang terserap sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp637.614.873 dengan sisa anggaran senilai Rp93.127,00.

- b. Belanja barang non operasional pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.145.598.835 atau 37,40% dari tahun 2024, yang terlihat dari :

- Belanja bahan sebesar Rp573.825.972, dengan sisa anggaran sebesar Rp961.787.028,00.
- Belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp1.343.809.904, dengan sisa anggaran sebesar Rp1.439.096.

Adapun realisasi yang terserap sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.917.635.876, dengan sisa belanja barang non operasional diakhir tahun sebesar Rp963.226.124.

- c. Realisasi belanja jasa pada TA 2025 terjadi kenaikan sebesar Rp424.743.713,- atau 37,41% dibandingkan tahun 2024 yang digunakan untuk membiayai daya dan jasa sebagai berikut:

- Beban langganan listrik sebesar Rp279.990.020, dengan sisa anggaran sebesar Rp4.009.980,
- Beban langganan air sebesar Rp36.767.780, dengan sisa anggaran sebesar Rp4.802.220,
- Beban langganan daya dan jasa lainnya sebesar Rp316.692.000, dengan sisa anggaran sebesar Rp3.000,
- Beban jasa profesi sebesar Rp94.535.000, dengan sisa anggaran sebesar Rp1.400.000, dan
- Beban jasa lainya sebesar Rp832.200.000, dengan sisa anggaran Rp0.

Adapun realisasi yang terserap sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.560.184.800, dengan sisa anggaran diakhir tahun sebesar Rp10.215.200.

d. Realisasi belanja pemeliharaan pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.192.000.562, atau 72,57% dibandingkan tahun 2024 yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana satker sebagai berikut:

- Beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp249.962.500, dengan sisa anggaran sebesar Rp157.500,
- Beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp194.695.965, dengan sisa anggaran sebesar Rp101.035, dan
- Beban pemeliharaan jaringan sebesar Rp5.997.000, dengan sisa anggaran sebesar Rp3.000.

Adapun realisasi yang terserap sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp450.655.465, dengan sisa anggaran sampai akhir tahun adalah sebesar Rp261.535.

e. Sedangkan belanja perjalanan dalam negeri TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp644.233.126, atau 91,12% dibandingkan TA 2024, yang digunakan untuk dukungan kegiatan perjalanan dinas satker baik ke pusat maupun lokal dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp62.770.374, dengan sisa anggaran sebesar Rp59.626.

Adapun realisasi yang terserap sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp62.770.374, dengan sisa belanja perjalanan dinas diakhir tahun adalah sebesar Rp59.626.

f. Belanja barang persediaan konsumsi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.551.639 atau 18,54% dibandingkan tahun 2024, yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan persediaan barang konsumsi untuk bahan ATK perkantoran dan obat-obatan untuk peserta didik. Adapun realisasi anggaran yang terserap sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp19.994.000, dengan sisa anggaran diakhir tahun adalah sebesar Rp6.000.

Belanja
Modal

Rp49.996.620

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp49.996.620 dan Rp1.134.129.680. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan realisasi belanja modal untuk tahun 2025 dengan realisasi belanja modal tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA.2025	REALISASI TA.2024	% (NAIK/ TURUN)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.996.620	312.725.700	-84,01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Penambahan Gedung & Bangunan	0	821.403.980	-100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0	0	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	49.996.620	1.134.129.680	-95,59
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	49.996.620	1.134.129.680	-95,59

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada TA 2025 realisasi terhadap belanja modal terjadi penurunan sebesar Rp1.084.133.060 atau 95,59%.

Pada TA 2025 realisasi Belanja Modal merupakan belanja modal yang berasal dari anggaran Rupiah Murni (RM).

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada realisasi pada TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin*

Rp49.996.620

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp49.996.620 dan Rp312.725.700.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA.2025	REALISASI TA.2025	% (NAIK/ TURUN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.996.620	312.725.700	-84,01
Jumlah Belanja Kotor	49.996.620	312.725.700	-84,01
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	49.996.620	312.725.700	-84,01

Jumlah pagu anggaran Belanja modal peralatan dan mesin TA. 2025 adalah sebesar Rp49.997.000. Sedangkan realisasi sebesar Rp49.996.620 adalah Pembelian peralatan dan mesin berupa pengadaan Pengadaan Pemasangan Instalasi CCTV sebesar Rp49.996.620,00. Sisa anggaran pada akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp380.

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Sampai periode tahun 2025 ini tidak terdapat pengadaan baru berasal dari belanja modal gedung dan bangunan.

*Belanja Modal
Penambahan
Nilai Gedung dan
Bangunan
Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal penambahan nilai gedung dan bangunan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp821.403.980.

Sampai periode tahun 2025 ini tidak terdapat belanja atau pengadaan baru berasal dari belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan.

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada TA 2025.

*Belanja Modal
Lainnya Rp0*

B.5.6 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada realisasi belanja modal lainnya pada TA 2025.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada realisasi tersebut pada TA 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA AUDITED

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dan Perbandingan
Tahun 2025 dengan Tahun 2024*

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
Uang Tunai di Brankas Bendahara Pengeluaran	0	0
LS Bendahara	0	0
Uang Muka KPPN (Dana GUP)	120.000.000	180.000.000
Uang Muka KPPN (Dana TUP)	332.695.000	171.992.700
Pertanggungjawaban Dana GUP Nihil	-115.206.981	-170.786.421
Pertanggungjawaban Dana TUP Nihil	-319.216.356	-171.842.778
Uang Sisa GUP Nihil (Setor diluar TA)	0	0
Uang Sisa GUP Nihil (Setor Tahun Berjalan)	-4.793.019	-9.213.579
Uang Sisa TUP Nihil (Setor Tahun Berjalan)	-13.478.644	-149.922
Jumlah	0	0

Monitoring UP/TUP sepanjang periode TA 2025 diperlihatkan pada bagian halaman lampiran laporan ini.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Uang Tunai	0	0
Bank Persepsi	0	0
Jumlah	0	0

Pada satker SUPM Pariaman Bendahara Penerimaan tidak memiliki rekening penerimaan. Adapun transaksi Penerimaan pada Bendahara Penerimaan adalah bersifat setor langsung dimana setiap transaksi berupa penerimaan yang berasal dari kegiatan hasil TEFA (TBP, TPHP, dll) dan pemakaian semua fasilitas negara oleh pihak lain dalam hal ini sewa, kemudian disetor langsung ke Kas Negara.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

*Piutang Bukan
Pajak Rp102.185,00*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang bukan pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp102.185,00 dan Rp54.837,00. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB

Uraian	TH 2025	TH 2024
Piutang Bukan Pajak:	102.185	54.837
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	102.185	54.837

Piutang bukan pajak sebagaimana terlihat pada tabel diatas adalah piutang lainnya berasal dari pencatatan akrual pengembalian kelebihan pembayaran Tunkin bulan Desember 2025, bukti terlampir.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024

No	Nama	Tahun 2025	Tahun 2024
1	A	0	0
2	B	0	0
3	C	0	0
4	D	0	0
5	E	0	0
6	F	0	0
Jumlah		0	0

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1	A	0	0
2	B	0	0
3	C	0	0
4	D	0	0
5	E	0	0
Jumlah		0	0

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-
Piutang Lancar
Rp 511*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp511 dan Rp274. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	102.185	0,50%	511
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	102.185		511
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0,50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan		50%	0
Macet		100%	0
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0,50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	102.185		511

Berdasarkan tabel diatas penyisihan piutang tak tertagih berasal dari:

- Penyisihan piutang dari kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja PNS bulan Desember 2025 sebesar Rp511,00.

Belanja Dibayar diMuka Rp0

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pembayaran A	0	0
Pembayaran B	0	0
Pembayaran C	0	0
Jumlah	0	0

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pendapatan Jasa A	0	0
Pendapatan Jasa B	0	0
Jumlah	0	0

*Persediaan
Rp7.318.800*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.318.800 dan Rp1.303.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TH 2025	TH 2024
Barang Konsumsi	7.318.800	1.303.000
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Bahan Baku	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	7.318.800	1.303.000

Adapun rincian persediaan pada akhir 2025 adalah sebagai berikut :

a. Barang konsumsi senilai Rp7.318.800, setelah dilakukan stock opname dengan Berita Acara Hasil Inventaris Persediaan Nomor: B.1257/SUPM-PRM/PL.450/XII/2025 terhadap barang konsumsi maka terdapat beberapa item yang tersisa sebagai berikut :

- Sisa kelompok obat cair senilai Rp704.000,
- Sisa kelompok obat padat senilai Rp4.166.000,
- Sisa kelompok obat gas senilai Rp160.000,
- Sisa kelompok obat serbuk/tepung senilai Rp84.000,
- Sisa kelompok obat gel/salep senilai Rp1.199.000,
- Sisa kelompok obat lainnya senilai Rp1.005.800, dan

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024

No	Debitur	Tahun 2025	Tahun 2024
1	A	0	0
2	B	0	0
3	C	0	0
4	D	0	0
5	E	0	0
6	F	0	0
Jumlah		0	0

*Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
1	A	0	0
2	B	0	0
3	C	0	0
4	D	0	0
5	F	0	0
Jumlah		0	0

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih-Piutang
Jangka Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0,50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Tagihan PA			
Lancar	0	0,50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan		50%	0
Macet		100%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0		0

Tanah

Rp58.944.750.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPM) Pariaman per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp58.944.750.000 dan Rp58.944.750.000. Nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	58.944.750.000
revaluasi aset dari KPKNL	0
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2025	58.944.750.000

Tidak terdapat penambahan nilai terhadap aset tanah pada TA 2025.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	KIB (1) 188.900 m2	Jl Simp. Toboh V Koto Kp. Dalam Pariaman	54.308.750.000
2	KIB (2) 16.000 m2	Jl. Simp. Toboh V Koto Kp. Dalam Pariaman	4.636.000.000
Jumlah			58.944.750.000

Tanah pada KIB (1) yang terletak di Jl.Padang Birik-birik, Pariaman, pada tanggal pelaporan diduduki/digunakan oleh masyarakat.

Permasalahan Tanah	Kuantitas	Nilai
	(M2)	(Rp)
Sengketa	0	0
Tidak terdapat bukti Kepemilikan	0	0
Dikuasai pihak lain	52.425	3.433.837.500
	0	0

Tindak lanjut terhadap aset tanah :

1. Telah dilaporkan sebagai aset bermasalah kepada Sekretaris Badan Pengembangan SDM KP dengan nomor : B.120/SUPM-PRM/TU.210/V/2008 tanggal 14 Mei 2008.
2. Mengirim surat kepada Walikota Pariaman dengan nomor : B.142/SUPM-PRM/TU.210/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 perihal pemanfaatan tanah SUPM Negeri Pariaman oleh masyarakat padang birik-birik.
3. Menghadiri undangan hearing dengan Komisi I DPRD Kota Pariaman tanggal 7 Juni 2010 dengan isi risalah / notulen yaitu tanah yang dikuasai oleh masyarakat agar dapat diselesaikan secara damai tanpa ada pihak yang dirugikan.
4. Mengirim surat kepada Walikota Pariaman dengan nomor : B. 1166/SUPM-PRM/TU.210/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal pemanfaatan tanah di wilayah padang birik-birik sebagai lahan praktek siswa / siswi.
5. Mengirim surat kepada Sekretaris BPSDMKP dengan nomor : B.237/SUPM-PRM/PL.410/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 perihal usulan penghapusan atas tanah yang terkena erosi batang Naras dan menjadi sungai.

6. Melakukan koordinasi dengan Walikota Pariaman pada tanggal 11 Maret 2013 dalam rangka penyelesaian aset tanah yang dikuasai oleh masyarakat.
7. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 186/PMK.06/2009 dan nomor 24 Tahun 2009 bahwa BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian / Lembaga maka pada tanggal 8 April 2013 sertifikat tanah SUPM Negeri Pariaman sudah berganti nama menjadi Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini tanah SUPM Negeri Pariaman terdiri atas 2 sertifikat yaitu No. 10 (KIB.1) seluas 188.900 m² dan No. 11 (KIB. 2) seluas 16.000 m².
8. Pada bulan Juni 2014 Kepala SUPM Negeri Pariaman bersama perwakilan masyarakat dan Wali Nagari setempat melakukan koordinasi Ke Eselon 1 (Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan) membahas tentang penggantian tanah yang dikuasai masyarakat padang birik-birik.
9. Pada tanggal 14 Januari 2015 diadakan konsultasi antara pihak SUPM dengan Kepala Desa, Pengurus KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan anggota DRP dengan Sekda kota Pariaman untuk merundingkan kelanjutan permasalahan tanah.
10. Tanggal 6 September 2018 menerima tembusan surat Walikota Pariaman kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan perihal tidak setuju untuk dilakukan penyelesaian dikarenakan masih adanya silang pendapat antara pemerintah aparat desa yang sekarang dengan pihak SUPM dan sampai saat ini belum menerima informasi surat balasan dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.
11. Pada tanggal 20 Juni 2019 Pihak Sekolah mengundang pemuka masyarakat/perangkat Desa, dari pihak

pemerintah setempat diundang Kabid Pemkab Padang Pariaman, Kasie Penyelesaian Tanah DPUP Kota Pariaman, Kasi. Instruktur BPN Kota Pariaman, dan BPN Kab. Padang Pariaman sedangkan pihak SUPM Pariaman dipimpin oleh Kepala Sekolah didampingi oleh Sekretaris BDRSDM KP.

Adapun Isi rapat sebagai berikut :

1. Penyelesaian aset Tanah SUPM Negeri Pariaman yang ditempati warga tidak terkait dengan permasalahan wilayah Kota Pariaman dan Kab. Padang pariaman.
2. Dalam kepastian penentuan subjek dan objek tanah SUPM, Pihak SUPM akan mendaftarkan ke BPN Kab.Padang Pariaman untuk mengukur pengembalian batas Hak Pakai sertifikat No.1 Atas nama Pemerintah RI, cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal, 8 April 2013 dengan dukungan dan pendampingan Aparat Desa.
3. Kepala Desa, aparat Pemerintahan Kecamatan (Pariaman Utara dan Kampung Dalam) dan Pemkot Pariaman berharap kepada pihak Pemerintah pusat (KKP) agar warga yang sekarang menempati tanah SUPM di Dusun Padang Birik-Birik dilegalkan dengan pelepasan Hak seluas yang ditempati masyarakat dengan catatan tidak ada lagi penambahan bangunan baru di lokasi tersebut.
4. Akan diadakan lagi pertemuan lanjutan antara Ses BRSDM KP dengan Wali Kota Pariaman dan Bupati Padang Pariaman (Awal Juli 2019).
12. Berdasarkan surat dari Kepala BRSDM-KP nomor 1972/BRSDM/XI/2019 tanggal 6 November 2019 mengenai Penyelesaian Tanah SUPM Pariaman yang

Masih dikuasai oleh Masyarakat, dilakukan tindak lanjut dengan melaksanakan koordinasi dengan Camat Pariaman Utara, Kepala Desa Padang Birik-Birik beserta Masyarakat yang menempati lahan sengketa dengan hasil pembicaraan sebagai berikut :

- a. Camat Pariaman Utara selaku pihak pemerintah setempat akan mengundang warga yang menguasai lahan, beserta Kepala Desa, Pengurus KAN (Kerapatan Adat Nagari) Naras 3 Kota Pariaman dan Tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut.
- b. Camat akan meminta pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mengukur luas tanah SUPM Pariaman yang terpakai untuk warga desa Padang Birik-birik.
- c. Camat akan segera melaporkan hasil pertemuan ini ke Walikota Pariaman dan Dinas terkait.
- d. Sampai dengan penyusunan LK Semester II Tahun 2021 ini, belum ada tindak lanjut dan perkembangan tentang penyelesaian masalah tersebut.
- e. Dalam rangka untuk melakukan tindak lanjut terhadap penjagaan aset berupa tanah, pada tanggal 10 November Kepala SUPM bersurat kepada BPN Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan pengukuran ulang batas bidang tanah BMN milik SUPM Pariaman dengan surat Nomor: B.1019/SUPM.PRM/PL.210/XI/2025 tanggal 10 November 2025.

*Peralatan dan
Mesin
Rp20.091.042.388*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp20.091.042.388 dan Rp20.938.971.468, Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 25	20.938.971.468
Pembelian	49.996.620
Reklas Masuk	147.182.000
Jumlah	21.136.150.088
Pengurangan:	
-Penghentian Aset	897.925.700
-Reklas Keluar	147.182.000
-Aset Ekstrakomtabel	-
Jumlah	20.091.042.388
-Penyusutan Aset	- 19.212.107.503
Total Nilai buku per 31 Des.25	878.934.885

Penjelasan terhadap tabel diatas adalah sebagai berikut :

Transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

a. Mutasi tambah yang berasal dari pembelian asset peralatan dan mesin yaitu :

- Pembelian peralatan dan mesin berupa pengadaan pemasangan instalasi CCTV sebesar Rp49.996.620,00. Dan
- Reklas masuk dengan rincian sebagai berikut:
 - Senilai Rp147.182.000,00 adalah asset Intrakomtabel terkait perbaikan dan kesalahan pencatatan kodefikasi dan penggolongan BMN yang tercatat di kodefikasi Alat Persenjataan.,

b. Mutasi kurang yang berasal dari:

- Penghentian asset senilai Rp897.925.700,00.
- Reklas keluar senilai Rp147.182.000,00.

*Gedung dan
Bangunan
Rp45.855.129.092*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp45.855.129.092 dan Rp45.855.129.092. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	45.855.129.092
Transaksi tambah :	
-	-
Saldo per 31 Desember 2025	45.855.129.092
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(11.351.931.743)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	34.503.197.349

Sampai periode 31 Desember 2025 tidak terdapat transaksi penambahan maupun pengurangan aset gedung dan bangunan.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp5.008.947.000*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.008.947.000 dan Rp5.008.947.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	5.008.947.000
<u>Transaksi tambah :</u>	
-	0
<u>Transaksi kurang :</u>	
-	0
Saldo per 31 Desember 2025	5.008.947.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(3.410.936.989)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.598.010.011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat transaksi tambah maupun kurang aset Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp502.468.086*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp502.468.086 dan Rp502.468.086.

Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	502.468.086
<u>Mutasi tambah:</u>	
-	0
<u>Mutasi kurang:</u>	
-	0
Saldo per 31 Desember 2025	502.468.086
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(343.712.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	158.755.586

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap lainnya ini untuk Tahun 2025.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada tanggal pelaporan penyelesaian peralatan dan mesin, gedung dan bangunan tersebut telah diserahkan ke aset.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp34.318.688.735*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp34.318.688.735 dan Rp Rp33.171.561.864. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember

2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	20.091.042.388	19.212.107.503	878.934.885
2	Gedung dan Bangunan	45.855.129.092	11.351.931.743	34.503.197.349
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.008.947.000	3.410.936.989	1.598.010.011
4	Aset Tetap Lainnya	502.468.086	343.712.500	158.755.586
Jumlah		71.457.586.566	34.318.688.735	37.138.897.831

Aset Tak Berwujud **C.21 Aset Tak Berwujud**
Rp31.655.000

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp31.655.000 dan Rp31.655.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Pariaman berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	31.655.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	0
-	
Saldo per 31 Desember 2025	31.655.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(31.655.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software	31.655.000
Jumlah	31.655.000

*Dana yg dibatasi
Penggunaanya
Rp0*

C.22 Dana yang Dibatasi Penggunaanya

Saldo dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp215.680.000,00,00. Dana yang Dibatasi Penggunaannya atau yang lebih sering disebut dengan RPATA merupakan rekening lain-lain BUN yang digunakan untuk penampungan dana penyelesaian pekerjaan akhir tahun yang belum selesai pengerjaannya.

*Aset Lain-Lain
Rp1.565.547.700*

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.565.547.700 dan Rp736.182.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2025	736.182.000
Mutasi tambah:	
- Penghentian Aset Peralatan dan Mesin	897.925.700
Mutasi kurang:	
- Penghapusan aset	68.560.000
Saldo per 31 Desember 2025	1.565.547.700
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(1.136.240.900)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	429.306.800

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada periode tahun 2025 terdapat transaksi penambahan yaitu berupa Peralatan mesin yang dihentikan penggunaannya senilai Rp897.925.700,00. Kemudian penghapusan aset senilai Rp68.560.000,00 yang berasal dari aset gedung dan bangunan.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp1.167.895.900*

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp1.167.895.900 dan Rp227.148.605. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software komputer	31.655.000	31.655.000	0
Jumlah	31.655.000	31.655.000	0
Aset Lain-lain	1.565.547.700	1.136.240.900	429.306.800
Jumlah	1.597.202.700	1.167.895.900	429.306.800

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Pada akhir periode 31 Desember 2025 uang muka dari KPPN sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp33.162.972,00*

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp33.162.972,00 dan Rp243.466.072,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak SUPM Pariaman per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Tagihan Listrik bulan Desember 2025	29.533.772	Pemakaian Listrik bulan Desember 2025
Tagihan Air (PDAM) bulan Desember 2025	3.629.200	Pemakaian PDAM bulan Desember 2025
Total	33.162.972	

Sedangkan utang kepada pihak ketiga senilai Rp33.162.972,00 merupakan saldo akrual daya dan jasa (Listrik, dan Air) bulan Desember tahun anggaran 2025 yang telah dijurnal pada periode ini.

*Pendapatan yang
Ditangguhkan Rp0*

C.27 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPM) Pariaman per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

Uraian	Jumlah
Pendapatan PNPB	0
PPh yang belum disetor	0
Total	0

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0*

C.28 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
PT A	0
PT. B	0
PT C	0
Total	0

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,00*

C.29 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0 dan Rp0 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2025 dan TA 2024*

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Langganan Listrik Desember 2025	0	0
Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya Des 2025	0	0
Belanja Langganan Air Desember 2025	0	0
Jumlah	0	0

Sampai dengan periode pelaporan ini tidak terdapat beban yang masih harus dibayar.

*Utang yang belum
ditagihkan Rp0*

C.30 Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0, dan Rp0. Utang yang belum ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
-	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

*Hibah yang belum
disahkan Rp0,00*

C.31 Hibah yang Belum Disahkan

Hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0, dan Rp0. Hibah yang belum disahkan merupakan kewajiban atas penerimaan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga yang belum mendapatkan persetujuan MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga) dari KPPN.

*Ekuitas
Rp96.487.212.133*

C.32 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp96.487.212.133 dan Rp98.592.963.668,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB

Rp515.830.048

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp515.830.048 dan Rp568.836.167. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pend.dari Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	476.765.000	515.293.090	7,48
Pend.dari Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	5.457.000	8.763.000	37,73
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	7.889.875	20.903.777	62,26
Pend.dari Pemanfaatan BMN	0	0	0,00
Pend.dari Penggunaan Sarana, Prasarana sesuai dgn TUSI	25.718.173	16.076.300	59,98
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	0	0,00
Pendapatan Biaya Pendidikan	-	7.800.000	100,00
Pend. Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0,00
Jumlah	515.830.048	568.836.167	9,32

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tentang Pendapatan operasional TA 2025 mengalami penurunan sebesar 9,32% dari tahun 2024. Kenaikan pendapatan yang signifikan ini berasal dari kegiatan sebagai berikut :

- a. Transaksi kenaikan pada pendapatan tahun 2025, berasal dari :
 - Pendapatan Pendapatan sarana dan prasarana sesuai TUSI sebesar Rp25.718.173.

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp5.362.721.060

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.362.721.060 dan Rp5.109.636.788.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.341.465.408	5.110.434.479	4,52
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	21.255.652	0	-
Belanja Vakasi	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	5.362.721.060	5.110.434.479	4,94
Pengembalian Belanja Pegawai	(185.212)	(742.854)	
Jumlah Belanja	5.362.535.848	5.109.691.625	4,95

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan beban pegawai untuk TA 2025 sebesar 4,95%. Hal ini mengindikasikan bahwa beban terhadap penyelenggaraan kegiatan seluruh pegawai terhadap pagu anggaran di lingkup SUPM Pariaman cukup maksimal dalam periode 2025 tersebut.

Di tahun anggaran 2025 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Pariaman telah membayarkan semua hak kepada semua hak kepada 35 orang PNS dan 22 orang PPPK berupa gaji Januari sampai dengan Desember 2025, kemudian Gaji ke-13 dan ke-14, tunjangan-

tunjangan seperti : tunjangan kinerja bulan Januari sampai dengan Desember 2025, dan uang makan Januari sampai dengan Desember 2025.

Beban Persediaan
Rp13.978.200

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.978.200 dan Rp22.158.480. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, bahan untuk pemeliharaan dan persediaan bahan baku. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	13.978.200	22.158.480	-36,92
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban Persediaan	13.978.200	22.158.480	-36,92

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan beban persediaan terhadap anggaran yang dikelola dalam mengupayakan perolehan persediaan dalam satu periode TA 2025 yaitu sebesar 36,92%, hal ini mengindikasikan bahwa besaran nilai pengelolaan biaya terhadap perolehan persediaan belum maksimal.

*Beban Barang dan
Jasa*
Rp4.120.849.449

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.120.849.449 dan Rp6.201.755.117. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.211.440.845	2.112.650.550	42,66
Belanja Barang Non Operasional	1.343.809.904	2.688.486.119	50,02
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	27.892.044	100,00
Belanja Jasa	1.565.598.700	1.372.726.404	14,05
Jumlah Belanja	4.120.849.449	6.201.755.117	33,55

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan beban barang dan jasa terhadap anggaran yang dikelola terhadap barang dan jasa dalam periode TA 2025 yaitu sebesar 33,55% jika dibandingkan dengan TA 2024, hal ini mengindikasikan bahwa upaya dalam pengelolaan terhadap belanja barang dan jasa yang dianggarkan yaitu Rp5.622.717.000,- belum maksimal.

*Beban Pemeliharaan
Rp450.655.465*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp450.655.465 dan Rp663.995.980. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	249.962.500	267.046.400	6,40
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	194.695.965	383.392.580	49,22
Beban Pemeliharaan Jaringan	5.997.000	13.557.000	55,76
Beban Persed. Bahan utk Pemeliharaan	0	0	0,00
Jumlah	450.655.465	663.995.980	32,13

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan beban pemeliharaan yang dikelola pada periode TA 2025 yaitu sebesar 32,13% jika dibandingkan dengan TA 2024, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi upaya yang belum cukup maksimal dalam pegelolaan terhadap belanja pemeliharaan yang dianggarkan yaitu Rp450.917.000,-.

Beban Perjalanan

Dinas Rp62.770.374

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp62.770.374 dan Rp587.510.175. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	62.770.374	587.510.175	89,32
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
Jumlah	62.770.374	587.510.175	89,32

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa beban perjalanan dinas untuk TA 2025 megalami penurunan sebesar 89,32% dari TA 2024, hal ini dikarenakan pada periode tahun 2025 terjadi peghematan anggaran.

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPM) Pariaman untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2025.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat Tahun 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Untuk TA 2025 pada satker SUPM Pariaman tidak ada beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan

Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Untuk Beban Bantuan Sosial untuk TA 2025 satker SUPM Pariaman tidak ada kegiatan maupun yang dianggarkan.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp2.115.755.491*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.115.755.491 dan Rp2.245.169.924.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	483.860.449	558.455.718	13,36
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.413.187.627	1.396.697.496	1,18
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	33.004.120	33.004.120	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	96.344.629	166.276.199	42,06
Beban Penyusutan Jaringan	21.933.746	21.933.746	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	
Beban Penyusutan Aset Tetap yg Tdk digunakan dlm Operasional Pemerintah	67.424.920	68.802.645	2,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.115.755.491	2.245.169.924	5,76

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa beban penyusutan dan amortisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar 5,76% dibandingkan dengan TA 2024.

Beban Penyisihan

Piutang Tak Tertagih

Rp237

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp237 dan Rp(309.114). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	237	-309.114	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah	237	-309.114	0,00

Beban penyisihan piutang tak tertagih pada TA 2025 timbul sebagai akibat dari pencatatan akrual terhadap taksiran ketidak tertagihkan piutang yang dihitung berdasarkan persentase.

Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Rp35.947.508

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Kegiatan Non Operasional			
Pend. Pelepasan Aset Non Lancar	7.954.330	0	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	43.956.675	0	0,00
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-36.002.345	0	0,00
Kgt. Non Ops Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan non ops lainnya	54.837	2.235.778	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	84.061.750	-100,00
Perolehan lainnya	0	0	100,00
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	100,00
Surplus/Defisit Kgt.Non Operasional Lainnya	54.837	86.297.528	99,94
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-35.947.508	86.297.528	141,66

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat penurunan nilai dari Kegiatan Non Operasional LO untuk TA 2025 jika dibandingkan dengan TA 2024. Adapun rincian terhadap Kegiatan Non Operasional TA 2025 adalah sebagai berikut :

- Pendapatan pelepasan aset non lancer sebesar Rp7.954.330 berasal setoran pendapatan lelang.
- Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp54.837 yang berupa setoran pengembalian tunjangan kinerja tahun 2024.

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa

untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp98.592.963.668

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp98.592.963.668 dan 99.768.206.026.

Defisit LO

Rp11.646.847.736

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.646.847.736 dan Rp14.175.087.514. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang

Menambah/Mengurangi Rp3.278.000,00

E.3 Koreksi Menambah/Mengurangi

Koreksi Menambah/Mengurangi mencerminkan koreksi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.278.000 dan Rp0. Rincian Koreksi tambah/Kurang untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Tambah/Kurang

Jenis Koreksi Tambah/Kurang	Koreksi
Koreksi atas reklasifikasi aset	3.278.000
Selisih revaluasi aset tetap	0
Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	0
Jumlah	3.278.000

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.

Selisih Revaluasi aset Tetap untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp3.278.000,00*

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.278.000,00 dan Rp0,00.

*Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi TA
2025 dan TA 2024*

Jenis Aset Tetap	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	3.278.000	0	100,00
Jumlah	3.278.000	0	100,00

Tahun 2025 ini terdapat transaksi berupa koreksi terhadap

nilai aset tetap non revaluasi yang berasal dari jurnal yang terbentuk pada BMN terhadap transaksi reklas masuk dan reklas keluar asset BMN mengenai kodifikasi alat persenjataan yang seharusnya tidak ada pada satker SUPM Pariaman.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp9.537.818.201*

E.6 Transaksi Antar Entitas

Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Transaksi antar entitas Satker SUPM Pariaman pada periode 31 Desember tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.537.818.201,00 dan Rp12.999.845.156,00. Rincian dan perbandingan transaksi antar entitas TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2025 dan TA 2024

Uraian Transaksi	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.061.657.416	13.654.978.851	26,32
Diterima dari Entitas Lain	(523.839.215)	(655.133.695)	20,04
Transfer Keluar	0	0	0,00
Transfer Masuk	0	-	0,00
Jumlah	9.537.818.201	12.999.845.156	26,63

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan transaksi antar entitas pada TA 2025 sebesar 26,63% jika dibandingkan dengan TA 2024.

Adapun rincian terhadap transaksi antar entitas sebagai berikut :

- Ditagihkan ke entitas lainnya merupakan beban yang dikeluarkan selama periode TA 2025 sebesar Rp10.061.657.416;
- Diterima dari entitas lainnya merupakan penerimaan yang diterima selama periode TA 2025 sebesar Rp523.839.215.

*Koreksi Atas
Pendapatan Rp0*

E.7 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi tambah atas Pendapatan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Jumlah	0

*Koreksi Hibah
Masuk/ Keluar Rp0*

E.8 Koreksi Hibah Masuk/Keluar

Koreksi Atas Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Hibah Masuk/Keluar untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Hibah Masuk/Keluar

Jenis Koreksi	Koreksi
Hibah Peralatan dan Mesin	0
Jumlah	0

*Ekuitas Akhir
Rp96.487.212.133*

E.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp96.487.212.133 dan Rp98.592.963.668.

Rincian Ekuitas Akhir TA 2025 dan TA 2024

Uraian Transaksi	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Ekuitas Akhir	96.487.212.133	98.592.963.668	2,14
Jumlah	96.487.212.133	98.592.963.668	2,14

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pada TA 2025 jumlah ekuitas akhir mengalami penurunan sebesar 2,14% dibandingkan dengan TA 2024.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.1.1 Perkembangan Status e-rekon pada MONSAKTI

Pada saat rekonsiliasi tingkat eselon ini telah dilakukan peningkatan status e-rekon melalui prosedur upload data terbaru melalui aplikasi SAKTI modul GLP maupun modul aset dan persediaan. Masing-masing modul telah melakukan tutup periode ke-13 (Unaudited) Tahun 2025.

F.1.2 Tindak Lanjut Perbaikan CHR

Pada tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan 22 Januari 2026 dilakukan rekonsiliasi tingkat eselon 1 Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Tahun 2025 lingkup BRSDM KP, dan telah dilakukan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal KKP (review).

Pada tanggal 29 April 2026 telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN melalui penyelesaian penutupan periode ke-14 (Audited) Tahun 2025.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Tindak Lanjut Hasil Pemantauan BPK-RI

-

F.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

- Informasi belanja telah diungkapkan dan dicatat secara akrual pada Laporan Keuangan semester II tahun 2025 ini.

F.2.3 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Satker Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Pariaman adalah :

1. Rekening Virtual pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor persetujuan S-304/KPN.1206/2024 tanggal 26 Januari 2024 dengan rekening induk Nomor 023001004070309 (RKK BRSDM KKP OPS), yang digunakan untuk penampung DIPA BUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,-.

F.2.4 Revisi DIPA dan KPA

Selama periode berjalan, *Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPM) Pariaman* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 4 kali revisi DIPA dan 12 kali Revisi. Hal ini disebabkan oleh pemaksimalan pemakaian belanja pemerintah untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan serta efisiensi anggaran.

F.2.5 PENUNJUKKAN SATKER SUPM PARIAMAN SEBAGAI UAPPA-W WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Berdasarkan surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP) Nomor B.759 tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022, tentang Penunjukkan Satker SUPM Pariaman sebagai Satker UAPPA-W Provinsi Sumatera Barat.

F.2.6 CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

Capaian rincian output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN periode 31 Desember 2025 pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman antara lain terdapat pada data tabel capaian RO terlampir dibawah ini:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : DESEMBER satker : 427573

No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keuangan (Data Sakti)						GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Validasi	Catatan	Tanggal Rekan Di Sakti	Tanggal Kiri Di Sakti	Action	
									Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini											
														RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO										TPCRO (%)	PCRO (%)
1	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	03212	12	DL	2376	RAH715	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	49.997.000	49.996.620	100,00	1	Unit	0,00	0,00	0,00	1.0000	1,00	100,00	0,00	00	PN	selesai	00 - Data Valid	05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
2	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	03212	12	DL	2376	SAC811	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	3.057.627.000	2.092.948.250	68,45	90	Orang	90,00	100,00	42,88	90.0000	90,00	100,00	31,55	02	Non PN	terrealisasi dengan baik	00 - Data Valid	05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
3	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	03212	12	WA	2378	EBA962	Layanan Umum	1.000.000	995.000	99,50	1	Layanan	1,00	8,37	8,37	1.0000	1,00	100,00	0,50	00	Non PN	terrealisasi dengan baik	00 - Data Valid	05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
4	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	03212	12	WA	2378	EBA984	Layanan Perkantoran	7.954.461.000	7.916.910.758	99,53	1	Layanan	1,00	8,37	8,37	1.0000	1,00	100,00	0,47	00	Non PN	terrealisasi dengan baik	00 - Data Valid	05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
5	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	03212	12	WA	2378	EBD995	Layanan Manajemen Keuangan	1.000.000	992.000	99,20	1	Dokumen	1,00	8,37	8,37	1.0000	1,00	100,00	0,80	00	Non PN	terrealisasi dengan baik	00 - Data Valid	05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 21-01-26 13:17:48 oleh : 427573

- Pada kegiatan 2376.RAN.715.yaitu Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan pagu Rp49.997.000,00 dimana target outputnya adalah 1 Unit, terealisasi secara keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp49.996.620,00 (100,00%). Dimana capaian RO sampai dengan Desember 2025 adalah 100%.
- Kegiatan 2376.SAC.811 yaitu Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten dengan pagu Rp3.057.627.000,00, dimana targetnya adalah 90 orang, telah terealisasi keuangan sampai dengan periode Desember ini sebesar Rp2.092.948.250 (68,45%), dan capaian RO tercapai 100%.
- Kegiatan 2378.EBA.962 yaitu Layanan Umum dengan pagu Rp1.000.000,00 dimana target adalah 1 Layanan. Terealisasi secara keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp995.000,00 (99,50%). Dimana capaian RO sampai dengan Desember 2025 adalah 100%.
- Kegiatan 2378.EBA.994 yaitu Layanan Perkantoran dengan pagu sebesar Rp7.954.461.000,00 dengan target 1 Layanan. Terealisasi secara keuangan

sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp7.916.910.758,00 (99,53%). Sementara capaian RO diakhir periode Tahun 2025 sebesar 100%.

- e. Kegiatan 2378.EBD.955 yaitu Layanan Manajemen Keuangan dengan pagu sebesar Rp1.000.000,00 dengan target 1 Dokumen. Terealisasi secara keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp992.000,00 (99,20%). Sementara capaian RO sebesar 100%.

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (427573) SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN
Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM
Tgl Cetak : 30/04/26 8:49 AM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	43,956,675	0
JUMLAH			144,701,486,417	144,701,486,417

Keterangan :
FINAL

Pariaman, 30 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Adnal Yeka, A.Pi.,M.Si
NIP. 197307171996031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (427573) SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN Tgl Data : 30/04/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 30/04/26 8:50 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	10,061,657,416
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	523,839,215	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	476,765,000
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	5,457,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	7,954,330
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,889,875
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	25,718,173
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	54,837
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,881,073,500	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24,434	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	155,901,370	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	51,413,616	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,320,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	48,457,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	12,494,715	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	110,150,820	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	283,328,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	59,200,000	0
3.0	511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru	304,412,400	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	223,803,100	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,985	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,052,530	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,573,504	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14,339,160	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	56,901,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	11,460,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	21,303,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,810,236,383	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	285,982,103	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	538,824,873	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	98,790,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	573,825,972	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,343,809,904	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19,994,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	279,990,020	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	36,767,780	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (427573) SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN
Tgl Data : 30/04/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 30/04/26 8:50 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	316,692,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	94,535,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	832,200,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	249,962,500	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	194,695,965	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5,997,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62,770,374	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49,996,620	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	24
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	188
JUMLAH			10,585,681,843	10,585,681,843

Keterangan :
FINAL
Pariaman, 30 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Adnal Yeka, A.Pi.,M.Si
197307171996031002

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : 12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
WILAYAH/PROVINSI : 0800	SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : 427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN

Tgl. Cetak 30/04/2026 3:48 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	54,837	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	274
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,303,000	0
0.0	131111	Tanah	58,944,750,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	20,938,971,468	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	45,855,129,092	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,296,042,000	0
0.0	134112	Irigasi	2,001,406,000	0
0.0	134113	Jaringan	711,499,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	502,468,086	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	19,629,450,754
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	9,938,744,116
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,728,926,840
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	1,344,812,006
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	185,915,648
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	343,712,500
0.0	162151	Software	31,655,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	215,680,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	736,182,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	195,493,605
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	31,655,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	37,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	27,749,072
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	215,680,000
0.0	391111	Ekuitas	0	98,592,963,668
JUMLAH			132,235,140,483	132,235,140,483